Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia p–ISSN: 2541-0849
e-ISSN: 2548-1398
Vol. 10, No. 2, Februari 2025

MANAJEMEN ISU PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERKAIT POLEMIK SAMPAH DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Gugus Hendrian[1], Iva Fikrani Deslia[2]
Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia[1,2]
Email: gugushendrian@gmail.com[1]

Abstrak

Permasalahan pengelolaan sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menjadi perhatian serius, terutama dengan ditutupnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan pada tahun 2023 akibat kapasitas yang berlebihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi manajemen isu yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam menangani krisis sampah. Sebagai provinsi dengan tingkat kunjungan wisata yang tinggi, DIY menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan lingkungan di tengah pertumbuhan penduduk yang cepat, infrastruktur pengelolaan sampah yang terbatas, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi upaya hubungan masyarakat pemerintah dalam menyampaikan informasi, mendidik masyarakat, dan melibatkan pemangku kepentingan dalam solusi pengelolaan sampah. Penelitian ini juga menyoroti dimensi teknis, sosial, ekonomi, dan politik dari pengelolaan sampah, dengan menekankan pentingnya strategi holistik yang melibatkan pemerintah, LSM, sektor swasta, dan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai kampanye kesadaran dan regulasi, upaya tersebut sering kali gagal menghasilkan perubahan perilaku yang nyata atau menyediakan solusi yang berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa manajemen isu yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi yang menyelaraskan proses pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memulihkan citra Yogyakarta sebagai destinasi yang bersih dan berkelanjutan bagi penduduk dan wisatawan.

Kata Kunci: Manajemen isu, pengelolaan sampah, Daerah Istimewa Yogyakarta, hubungan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, partisipasi masyarakat.

Abstract

The issue of waste management in Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) has become a pressing concern, particularly with the closure of the Piyungan landfill in 2023 due to overcapacity. This research aims to analyze the issue management strategies implemented by the local government to address the waste crisis. As a province with a high volume of tourism, DIY faces significant challenges in maintaining environmental sustainability amidst rapid population growth, limited waste management infrastructure, and low public awareness. Using a qualitative approach, this study explores the government's public relations efforts in disseminating information, educating the public, and involving stakeholders in waste management solutions. The research also highlights the technical, social, economic, and political dimensions of waste management, emphasizing the need for holistic strategies that engage government agencies, NGOs, private sectors, and the public. The findings reveal that while numerous awareness campaigns and regulations have been introduced, they often fail to produce tangible changes in behavior or provide sustainable solutions. The study concludes that effective issue management requires an integrated approach that aligns upstream and downstream waste management processes, fosters public participation, and strengthens collaboration among stakeholders. These efforts are crucial

to restoring Yogyakarta's reputation as a clean and sustainable destination for residents and visitors alike.
***Keywords**: Issue management, waste management, Special Region of Yogyakarta, public relations, environmental sustainability, community participation.*

Pendahuluan

Hubungan masyarakat (Humas) atau sering dikenal sebagai Publik Relation, adalah komponen penting yang ada di setiap instansi, baik itu lembaga komersial (perusahaan) ataupun lembaga non-komersial. Baik Yayasan, lembaga, perguruan tinggi, dinas, kantor, dan bahkan instansi milliter dan kepolisian diseluruh Indonesia membutuhkan keberadaan departemen atau fungsi Humas. Permintraan akan bidang atau devisi Humas semakin meningkat karena peran pentingnya. Humas berfungsi sebagai seluruh koordinasi dengan publik atau masyrakat, dan seringkali beperan dalam membangun citra organisasi tersebut (Khorotunniswah, 2020; Widjaja, 1997).

Batasan humas, yaitu sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun keluar antar suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian, menurutnya humas pada intinya senantiasa berkenan dengan kegiatan pencapaian pemahaman melalui pengertian, dan melalui kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan akan muncul suatu dampak yakni perubahan yang positif (Ruslan, 2012). Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah menghadapi tantangan yang kompleks dalam mengelola isu-isu terkait lingkungan, termasuk isu polemik sampah (Ernes et al., 2020; Kustiawati et al., 2019).

Menurut data Dinas Lingkungan Hidup DI Yogyakarta pada tahun 2022, volume sampah di Yogyakarta mencapai 858.21 ton per hari dan 313.245.20 ton per tahun. Polemik sampah menyebabkan pemerintah menutup TPA Piyungan pada 23 Juli 2023. Penutupan dilakukan karena sampah di TPA Piyungan telah melebihi kapasitasnya, sehingga membuat tumpukan sampah di banyak tempat penampungan sementara (TPS) di Yogyakarta. Bahkan hampir semua TPS terpaksa menutup layanan pembuangan sampah mereka karena tidak memiliki tempat pembuangan sampah yang terkumpul, membuat banyak warga bingung mencari tempat pembuangan sampah.



Gambar 1. DPRD Jogja Sebut Masalah Sampah Makin Menjadi Sejak Desentralisasi

Sumber : www.detik.com

Sebagai salah satu daerah dengan tingkat kunjungan wisata yang tinggi, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan lingkungan yang bersih dan sehat. Dalam menghadapi permasalahan polemik sampah, strategi humas memainkan peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat, mengedukasi masyarakat, dan membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dalam manajemen sampah. Polemik sampah di DIY tidak hanya mencakup masalah pengelolaan sampah secara teknis, tetapi juga melibatkan isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, strategi humas yang efektif haruslah holistik dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan media massa.

Karena laju kelahiran yang tinggi dan migrasi penduduk dari daerah sekitarnya, Yogyakarta mengalami pertumbuhan penduduk yang cepat. Jumlah sampah yang dihasilkan setiap hari meningkat sebagai akibat dari peningkatan ini. Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah Yogyakarta masih kurang. Pengelolaan sampah yang dihasilkan kota ini menjadi sulit karena jumlah tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas (Nindia et al., 2019; Sari Putri et al., 2020). Rendahnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Meskipun telah dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah, masih ada banyak orang yang tidak peduli dan tidak mengikuti program daur ulang atau memilah sampah. Kebijakan dan Regulasi yang Tidak Efektif: Kebijakan dan regulasi pengelolaan sampah yang tidak efektif dan tidak terintegrasi menyebabkan masalah.

Situasi Yogyakarta dengan status darurat sampah disebabkan oleh kebijakan, perilaku masyarakat, dan prioritas pemerintah yang gagal menyelesaikan masalah sampah. Sejak munculnya masalah ini, pemerintah paling sering melakukan perluasan atau penambahan lahan transisi di TPST Piyungan. Sebenarnya, pemerintah dapat melakukan banyak hal melalui kebijakan atau Peraturan Pemerintah, serta mendapatkan bantuan dari kelompok dan masyarakat yang berfokus pada masalah sampah. Pemerintah dan masyarakat DIY saat ini harus belajar tentang konsekuensi menunda-nunda dan tidak sungguh-sungguh. Saat ini pemerintah dihadapkan pada tuntutan waktu dan situasi terkait dengan penumpukan sampah di berbagai sudut kota Yogyakarta.

Upaya demi upaya mulai dibahas untuk membuat kebijakan strategis yang dapat dilaksanakan. Salah satu contohnya adalah mulai berbicara tentang cara untuk membiayai penyelesaian masalah sampah melalui anggaran. Terciptanya kebijakan yang tepat guna dan berkelanjutan tidak dapat dijamin dengan anggaran yang besar. Kesadaran masyarakat telah diusahakan, sosialisasi-sosialisasi telah dilakukan berulang kali, tetapi tidak pernah menghasilkan perubahan. Pemerintah harus memiliki pemahaman yang kuat tentang proses pengolahan sampah, terutama dalam hal teori dan praktik "hulu dan hilir sampah", jika mereka ingin mengatasi masalah sampah. Hilir adalah pengolahan sampah terakhir, seperti industri pengolahan sampah (pengolahan), dan hulu adalah sumber sampah (pengumpulan), seperti TPS3R, rumah tangga, atau komunitas yang memiliki kemampuan untuk mengupayakan pengumpulan sampah untuk dapat dikelola pada hilir. Untuk memastikan pengelolaan sampah yang efektif, alur proses pengendalian sampah "hulu dan hilir" harus diawasi. Upaya ini termasuk membantu kelurahan untuk mengolah sampah secara mandiri dan membangun industri pengolahan sampah yang dapat menangani sampah yang dihasilkan dari "hulu".



Gambar 2. Warga Pengok Geruduk Kantor DLH Kota Jogja
Sumber : jogjapolitan.harianjogja.com

Selain itu, sistem pengelolaan sampah yang belum optimal merupakan masalah tersendiri. Sampah sering terkumpul di berbagai tempat karena pengumpulan, pemilahan, dan pengangkutan sampah yang tidak efektif (Larasati & Laila, 2020; Sandyka Rukmana et al., 2021). Agar sistem yang ada berfungsi dengan lebih baik, kolaborasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat perlu ditingkatkan. Problem sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi selain lingkungan. Polusi sampah dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dan kesehatan mereka. Selain itu, masalah kebersihan dapat memengaruhi persepsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai destinasi wisata, yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada pariwisata dan ekonomi lokal.

Penelitian sebelumnya telah mengkaji berbagai strategi komunikasi dan manajemen isu yang digunakan oleh humas pemerintah dalam konteks yang berbeda. Luas et al. (2020) meneliti strategi komunikasi pemerintah dalam mendukung pengurangan kemasan plastik di Kelurahan Tosuraya Barat, yang menunjukkan bahwa keberadaan Bank Sampah dan instruksi bupati kepada ASN serta pejabat lokal mampu mengurangi penggunaan plastik secara signifikan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam. Fokus penelitian ini lebih terarah pada peran humas dalam mendukung program pengurangan sampah plastik di level kelurahan.

Penelitian lain oleh Rachmawati (2023) mengkaji strategi humas pemerintah dalam manajemen isu di era post-truth. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi agenda building digunakan untuk mengelola isu, yang meliputi perencanaan tim krisis, analisis media, dan produksi narasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis dengan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi, yang berfokus pada bagaimana humas pemerintah menjaga citra positif di tengah tantangan era post-truth.

Selain itu, Putra dan Daga (2019) menganalisis strategi media relations yang diterapkan oleh Humas Pemerintah Kabupaten Ngada. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa hubungan kerja antara humas dengan media massa perlu ditingkatkan untuk membangun citra positif pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Fokus penelitian ini adalah pada peningkatan kerja sama antara humas dan media massa.

Penelitian oleh Segarwati dan Rakhmaniar (2021) membahas strategi komunikasi krisis yang diterapkan Humas Pemerintah Kota Bandung dalam menangani pandemi COVID-19. Studi ini mengidentifikasi tahapan krisis, mulai dari komunikasi internal kepada ASN hingga perbaikan citra dan reputasi pemerintah melalui media relations. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis sumber-sumber relevan.

Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji strategi humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menangani polemik sampah di DIY menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini menciptakan celah penelitian yang perlu diisi untuk memahami bagaimana strategi humas dapat menangani isu lingkungan yang kompleks di Yogyakarta.

Sebagaimana latar belakang tersebut tujuan yang hendak di capai pada studi ini yaitu untuk mengetahui Manajemen isu yang terkait tentang polemik sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif Deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka. Informan dipilih lebih dari 3 orang, yaitu pemilihan informan berdasarkan pada karateristik tertentu yang mempunyai kompetensi dalam manajemen isu (Kriyantono, 2013). Teknik validitas menggunakan triangulasi data/sumber. Teknik analisis data menggunakan Teknik model *Miles and Huberman* yang dilakukan secara interaktif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mandalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya. Karena peneliti menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling, dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Selain itu tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami (*understandable*) dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru (Sugiyono, 2023).

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan berbagai pihak yang relevan, termasuk Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, staf Humas, Dinas Lingkungan Hidup, serta masyarakat yang terdampak oleh polemik sampah. Teknik ini bertujuan menggali informasi lebih dalam terkait manajemen isu yang dilakukan. Selanjutnya, observasi partisipan digunakan untuk mengamati secara langsung aktivitas Humas Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk memantau kegiatan mereka di media sosial dan proses pengelolaan isu sampah. Observasi ini memberikan data empiris mengenai implementasi strategi Humas. Terakhir, teknik dokumentasi diterapkan dengan mencatat dan

mengumpulkan dokumen, arsip, serta laporan yang relevan, seperti buku, laporan resmi, dan dokumen internal, guna memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Kombinasi ketiga teknik ini memberikan data yang holistik dan mendalam untuk mendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Teknik validitas data berupa analisis triangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia . Penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi data. Triangulasi data didapat dengan mengumpulkan data sejenis dan membandingkannya dengan sumber data yang berbeda dengan permasalahan yang sama. Menurut Miles dan Hubermas (2014). Terdapat empat komponen pokok dalam menyusun penelitian yang bersifat kualitatif, yaitu :

a. Pengumpulan data
   Pengumpulan data didapat dari wawancara (Tanya jawab) dengan tim manajemen isu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang polemik Sampah, serta dengan menggunakan studi kepustakaan untuk menggali topik-topik yang terkait dengan penelitian.
b. Reduksi Data
   Setelah semua data atau informasi ini terkumpul lengkap, peneliti melakukan proses penelitian, pemusatan perhatian pada satu fokus, membuang hal-hal yang tidak diperlukan untuk mengatur data yang sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan.
c. Penyajian Data
   Penyajian data dapat diketahui apa yang terjadi dan kemungkinan untuk mengerjakan sesuatu pada analisa ataupun tindakan penyajian data itu sendiri dapat diketahui apa yang terjadi dan ataupun tindakan penyajian data itu sendiri dapat berupa kalimat-kalimat, ceritacerita maupun tabel-tabel.
d. Penarikan Kesimpulan
   Merupakan sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi penelitian yang utuh. Peneliti memberikan makna penuh dari data yang terkumpul dan telah diolah tadi, sehingga membentuk satu synopsis utuh seluruh rangkaian panujang penelitian ini.

Teknik Validasi Data

Penelitian ini menggunakan Teknik validitas data berupa analisistriangulasi, yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia (Kriyantono, 2013). Penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi data. Triangulasi data didapat dengan mengumpulkan data sejenis dan membandingkannya dengan sumber data yang berbeda dengan permasalahan yang sama. Pada penelitian ini, Teknik triangulasi dipergunakan dengan manfaat dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Triangulasi sumber melibatkan membandingkan dan memverifikasi data wawancara dengan narasumber yang berbeda untuk meningkatkan kepercayaan terhadap hasil data. Triangulasi Teknik melibatkan membandingkan dan memverifikasi data dengan mengobservasi dan mendokumentasikan kegiatan terkait. Dengan teknik triangulasi, penelitian ini memastikan keabsahan dan keandalan data serta memperoleh pemahaman tentang Manajemen Isu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Polemik Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil dan Pembahasan

Regulasi mengenai pengelolaan sampah pada program pemerintah tentunya sudah ada yang dikeluarkan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah. Namun hal tersebut belum bisa menghasilkan pemerataan dalam pelaksanaannya di lapangan, masih ada hambatan dan sandungan yang terjadi ketika pelaksanaan regulasi tersebut. Kota jogja menjadi salah satu contoh dari pelaksanaan yang sedikit terhambat untuk regulasi pengelolaan sampah yang ada. Secara luas geografi kota jogja merupakan yang paling kecil namun memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Oleh karena itu dengan kepadatan penduduk dan luas geografi, pemerintah kesulitan untuk mencari space atau tempat yang dapat digunakan untuk pengelolaan sampah.

Dalam pengelolaan sampah pemerintah sudah melakukan analisis dampak yang terjadi apabila membangun pengelolaan sampah di kota jogja dengan penduduk padat dan ruang yang terbatas. Secara analisis dampak lingkungan memiliki batasan-batasan yang harus dipenuhi untuk mendirikan tempat pengelolaan sampah. Selanjutnya, masyarakat yang berada di lingkungan yang akan didirakan tempat pengelolaan sampah tentu akan merasa terganggu, masyarakat perumahan yang akan menolak adanya pembangunan.

Regulasi dan peraturan yang sudah ada dari pemerintah masih belum bisa terlaksana dengan maksimal untuk pengelolaan sampah pada kota jogja, dikarenakan lahan dan persetujuan masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah kota jogja melakukan pendekatan dengan kabupaten lain, salah satunya yaitu Kabupaten Bantul.

Kerjasama dengan Kabupaten Bantul ketika kabupaten sudah surplus. Surplus yang dimaksudkan adalah jumlah pengeluaran sampah perhari yang melebihi sampah yang dikeluarkan. Setiap daerah memiliki output sampah per ton untuk setiap hari. Kabupaten Bantul memiliki 5 tempat pengelolaan sampah, masing-masing tempat memiliki kapasitas untuk mengelola sampah. Satu tempat pengelolaan sampah hanya mampu mengelola 20 ton sampah perhari. Berarti kabupaten bantul mampu mengelola sampah 100 ton perhari. Padahal secara output masyarakat bantul hanya sebanyak 80 ton, berarti surplus 20 ton sampah perhari. Adanya surplus 20 ton tersebut pemerintah kota dapat mengajukan kerjasama untuk menggunakan kelebihan 20 ton tersebut digunakan untuk membuang sampah dari daerah kota jogja ke daerah bantul.

Permasalahan baru yang muncul sekarang adalah setiap kabupaten kota berjuang dari struggle sampahnya sendiri, belum ada tempat dari kabupaten kota itu yang surplus. Hal ini menjadi permasalahan bagi kota jogja, dari 200 ton perhari yang dikeluarkan oleh masyarakat, pengelolaan sampah baru bisa mengelola 160 ton perhari. Dengan total tersebut berarti masih ada tersisa 40 ton perhari yang masih belum dikelola dan menumpuk di depo. Sirklus penumpukan sampah di depo berawal dari masyarakat yang membuang sampah kepada petugas sampah, petugas sampah akan memberikan kepada depo, dan dari depo baru akan dikelola lagi. Sebab ada minus 40 ton sebelumnya, maka terjadilah penumpukan sampah pada kota jogja.

Pemerintah sebenarnya sudah memahami bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggung jawabnya, mengingat warga sudah membayar pajak dan retribusi sampah. Oleh karena itu, ketika masyarakat telah melaksanakan kewajibannya, pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan sampah. Namun, masalah ini tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja; ada perubahan kebiasaan masyarakat yang perlu dilakukan.

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, pengelolaan sampah tidaklah sulit jika masalah sampah rumah tangga dapat diatasi terlebih dahulu. Sebagai contoh, di Australia, biaya retribusi pembuangan sampah yang tinggi mendorong masyarakat untuk memilah sampah dengan lebih sadar. Hal ini berbeda dengan di

Indonesia, di mana biaya retribusi sampah relatif rendah dan kurangnya edukasi tentang pengelolaan sampah dari usia dini, sehingga tidak ada kebiasaan untuk memilah dan mengelola sampah. Perubahan kebiasaan ini memang memerlukan waktu dan pendekatan yang bertahap.

Pemilahan sampah adalah langkah awal yang penting dalam pengelolaan sampah yang efektif. Jenis-jenis sampah, seperti sampah organik, anorganik, dan sampah berbahaya, harus dipisahkan dengan benar agar dapat dikelola dengan lebih efisien. Masalah sampah seharusnya dimulai dari setiap rumah tangga yang kemudian dapat menciptakan nilai ekonomi, seperti daur ulang atau pengolahan sampah yang dapat menghasilkan produk yang berguna. Dimulai dari hal-hal kecil ini, dampaknya dapat besar dalam pengelolaan sampah secara keseluruhan.

Dalam jangka panjang, pemerintah tidak boleh melemparkan masalah ini, melainkan harus memikul tanggung jawab dengan bijak. Pengelolaan sampah merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, bukan provinsi, karena retribusi sampah yang dibayar oleh warga dikumpulkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemasukan dari retribusi sampah ini menjadi bagian dari pendapatan pemerintah daerah, yang seharusnya digunakan untuk pengelolaan sampah secara efektif. Berbeda dengan pajak kendaraan bermotor yang merupakan tanggung jawab provinsi, masalah sampah adalah tanggung jawab serius pemerintah kabupaten/kota.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), selama ini pengelolaan sampah masih dilakukan dengan cara menumpuk dan membuangnya di tempat pembuangan akhir (TPA), seperti di Piyungan. Namun, pengelolaan ini belum melibatkan teknologi yang memadai, seperti sistem pemilahan otomatis. Akibatnya, masyarakat masih terbiasa dengan cara lama, yaitu hanya menumpuk sampah, padahal kapasitas TPA Piyungan sudah terbatas.

Ketika kapasitas TPA terlampaui, dampaknya bisa sangat buruk terhadap lingkungan sekitar, termasuk kontaminasi air sumur, polusi udara, dan dampak sampah yang menumpuk hingga membentuk bukit. TPA Piyungan seharusnya sudah berhenti beroperasi pada 2022, namun pemerintah kabupaten/kota masih belum cepat beradaptasi dengan pengelolaan sampah yang lebih modern, seperti mengganti sistem landfill dengan teknologi pengelolaan yang lebih ramah lingkungan. Akhirnya, pada level provinsi, masalah sampah yang belum terkelola dengan baik akan menjadi tanggung jawab provinsi, karena residu dari pengelolaan sampah akan diserahkan ke tingkat provinsi.

Sebenarnya, TPA Piyungan dimaksudkan sebagai tempat pembuangan akhir untuk sampah yang benar-benar menjadi residu, namun pengelolaan sampah seharusnya dimulai dari tingkat kabupaten/kota. Dengan adanya teknologi yang lebih canggih, seperti pemilahan otomatis, masalah sampah dapat diatasi dengan lebih efektif, mengurangi risiko overload di TPA dan memperbaiki dampak lingkungan. Karena selama ini mobil pembuang sampah hanya membuang sampah secara sembarangan, maka TPA Piyungan akhirnya ditutup oleh gubernur, karena kapasitasnya sudah melebihi batas dan dapat membahayakan masyarakat sekitar, terutama dengan risiko tertimpa reruntuhan sampah yang sudah membukit.

Kabupaten dan kota sempat mengalami kesulitan dalam mengelola sampah, namun hal ini menjadi pelajaran penting dalam proses peralihan teknologi. Pengelolaan sampah yang sebelumnya dilakukan secara terpusat kini harus dilakukan secara mandiri, dengan tahapan yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Proses ini melibatkan pembukaan lahan baru dan pengadaan alat pengelolaan sampah. Lahan yang

tersedia hanya mampu menampung sejumlah ton sampah, sehingga diperlukan pembukaan lahan tambahan, yang tentunya membutuhkan waktu.

Saat ini, proses pengelolaan sampah di tingkat kabupaten telah selesai, sementara kota belum berhasil menyelesaikan masalah yang sama. Meskipun tidak ada kerugian material yang jelas, namun pengelolaan ini memerlukan anggaran tambahan karena adanya perubahan yang terjadi. Perubahan ini juga memaksa masyarakat untuk keluar dari zona nyaman mereka dan menciptakan lahan baru untuk pengelolaan sampah. Selain itu, anggaran untuk teknologi dan alat pengelolaan sampah juga semakin membengkak.

Meskipun kerugian material tidak langsung terlihat, citra pemerintah sedikit terganggu akibat perilaku sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan, terutama di pinggir jalan. Hal ini mengurangi daya tarik wisatawan karena banyaknya sampah yang terlihat di berbagai tempat. Lebih jauh lagi, ada kejadian sebelumnya di mana masyarakat membuang sampah ke sungai, dan saat musim penghujan datang, volume air sungai meningkat sehingga menyebabkan banjir. Dampak banjir ini dapat menimbulkan kerugian material yang lebih nyata.

Terkait dengan pengelolaan sampah di kota, sebagian masyarakat menentang pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, yang menyebabkan pemerintah harus mundur dalam upaya tersebut. Di sisi lain, Menteri Lingkungan Hidup dan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, berencana untuk menyelidiki secara mendalam kasus penumpukan sampah di Mandala. Menteri tersebut menilai penumpukan sampah adalah kegagalan pemerintah, karena dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

Penumpukan sampah di Kota Yogyakarta memang mempengaruhi lingkungan, meskipun dampaknya terhadap jumlah wisatawan tidak signifikan, karena penumpukan sampah terjadi di lokasi yang jauh dari area wisata. Namun, saat wisatawan datang, volume sampah bisa meningkat dua kali lipat, terutama sampah yang berasal dari hotel. Sebagai solusi, pemerintah mendorong pihak hotel untuk mengelola sampah mereka secara mandiri. Beberapa hotel sudah mulai berhasil mengelola sampah rumah tangga secara internal, dan pemerintah mendukung upaya hotel-hotel lainnya untuk menangani masalah ini di tingkat mereka masing-masing.

Kesimpulan

Pengelolaan sampah di Kota Yogyakarta menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan lahan, kesulitan dalam mendapatkan persetujuan masyarakat, hingga kurangnya teknologi yang memadai. Meskipun regulasi telah ada, pelaksanaannya belum optimal karena adanya hambatan baik dari sisi infrastruktur maupun perubahan kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Kolaborasi dengan kabupaten lain, seperti Kabupaten Bantul, telah diupayakan untuk mengatasi surplus sampah, namun masalah utama masih berupa kurangnya kapasitas pengelolaan di tingkat kabupaten/kota yang mengakibatkan penumpukan sampah. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, namun upaya ini memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam hal pemilahan sampah dari tingkat rumah tangga.

Pemerintah Kota Yogyakarta perlu segera meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan memberikan edukasi tentang pemilahan sampah sejak dini. Selain itu, pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan efisien, seperti sistem pemilahan otomatis, harus diprioritaskan untuk mengurangi beban di tempat pembuangan akhir. Pemerintah juga harus memperkuat kerjasama antar kabupaten/kota untuk mengoptimalkan kapasitas

pengelolaan sampah secara regional, termasuk memanfaatkan surplus pengelolaan sampah dari daerah lain. Dengan adanya pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, masalah pengelolaan sampah di Yogyakarta dapat diselesaikan secara lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

BIBLIOGRAFI

Ernes, E., Prakoso, L. Y., & Risman, H. (2020). Strategi Perang Semesta Melalui Pemberdayaan Fungsi Hubungan Masyarakat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. *Jurnal Strategi Perang Semesta*, *6*(2).

Khorotunniswah, L. (2020). Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Membangun Citra Lembaga. *Jurnal Kependidikan Islam*, *10*(2). https://doi.org/10.15642/jkpi.2020.10.2.176-189

Kriyantono, R. (2013). Manajemen Periklanan: Teori dan Praktik. In *Universitas Brawijaya Press*.

Kustiawati, K., Setiadarma, A., & Priliantini, A. (2019). Strategi Public Relations dalam Manajemen Isu Keamanan Pangan di Pizza Hut Indonesia. *Jurnal Komunika : Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, *8*(1). https://doi.org/10.31504/komunika.v8i1.1876

Larasati, N., & Laila, F. (2020). Analisis Sistem Pengelolaan Sampah Organik di Universitas Indonesia (Studi Kasus Efektivitas Unit Pengolahan Sampah UI Depok). *Jurnal Nasional Kesehatan Lingkungan Global*, *1*(2).

Luas, A. F., Sondakh, M., & Londa, J. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menunjang Program Pengurangan Kemasan Plastik Pada Masyarakat Kelurahan Tosuraya Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, *2*(1).

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.

Nindia, Y., Hamdani, Asrin, T., & Mardiati. (2019). Deskripsi Kepadatan Lalat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Gampong Jawa Kota Banda Aceh Tahun 2019. *Jurnal Bioleuser*, *3*(1).

Putra, Y. K., & Daga, L. L. (2019). Strategi Media Relations Humas Pemerintah Kabupaten Ngada dalam Meningkatan Citra Pemerintah. *Jurnal Communio : Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, *8*(1 SE-Articles).

Rachmawati, F. (2023). Strategi Humas Pemerintah Dalam Pengelolalan Managemen Isu Di Era Post Truth. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *11*(1), 114–127.

Ruslan, R. (2012). Manajemen Public Relations Komunikasi. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*.

Sandyka Rukmana, S., Purwanto, A., & Paiman. (2021). Analisis Sistem Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Rasau Jaya Desa Kuala Dua Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Tahun 2021. *Geo Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Geografi Dan Pariwisata*, *1*(2).

Sari Putri, D. V., Nyai Sakti, H. P., & Walid, A. (2020). Pengaruh Tempat Pembuangan Akhir(TPA) Terhadap Pencemaran Udara Di lingkungan Sebakul Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT)*, *2*(2). https://doi.org/10.33772/jpmit.v2i2.15169

Segarwati, Y., & Rakhmaniar, A. (2021). Strategi Humas Pemerintah Kota Bandung dalam Menangani Krisis Pandemi Covid-19. *Jurnal Komunikasi Nusantara*, *3*(2). https://doi.org/10.33366/jkn.v3i2.79

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *CV. Alfabeta*.

Widjaja, H. A. W. (1997). Komunikasi: Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, *1*(2).

Copyright holder:
Gugus Hendrian, Iva Fikrani Deslia (2025)

First publication right:
Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia

This article is licensed under:

